

## Penguatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kabupaten Gunungkidul oleh relawan demokrasi pada pemilu 2019

Bayu Setya Anggara<sup>1</sup>, Suharno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta, Kab. Sleman, DIY, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Prodi PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta, Kab. Sleman, DIY, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kabupaten Gunungkidul oleh Relawan demokrasi, profil pemilih penyandang disabilitas dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pada pemilu 2019 tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dengan subjek penelitian yakni: Ketua Komisiner KPU Gunungkidul, Koordinator Relawan Demokrasi basis pemilih disabilitas, dan perwakilan PPDl Gunungkidul. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Uji validasi data dilakukan dengan *crosscheck*. Selanjutnya data dianalisis melalui tahap reduksi data, kategorisasi data dan unitisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 meliputi dua hal yaitu, *pertama*, melakukan sosialisasi kepada kelompok disabilitas dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait; Partisipasi atau penggunaan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul cukup rendah, hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa mayoritas merupakan penyandang disabilitas pada kategori fisik, tingkat pendidikan mayoritas Sekolah Dasar dan minimnya dukungan keluarga dan masyarakat, dan; hambatan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi penyandang disabilitas meliputi tiga hal yaitu, *pertama*, keterbatasan jumlah relawan demokrasi dari kelompok difabel, *kedua* rendahnya anggaran dana bagi relawan demokrasi, dan; *ketiga*, kurangnya dukungan masyarakat dan keluarga para penyandang disabilitas terkait dengan penggunaan hak pilihnya.

### ABSTRACT

This study aims to describe the increased participation of voters with disabilities in Gunungkidul Regency by Volunteers of Democracy, the profile of voters with disabilities and the obstacles faced in increasing participation in the 2019 election. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Determination of research subjects using a purposive technique with research subjects namely: the Chief Commissioner of the KPU Gunungkidul, the Coordinator of the Volunteer Democracy of the disabled voter base, and representatives of the PPDl Gunungkidul. Data were collected through interview and documentation techniques. Data validation test is done by crosscheck. Furthermore, the data were analyzed through the stages of data reduction, data categorization and data unitization, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the efforts made by the democracy volunteers of Gunungkidul Regency in increasing the participation of voters with disabilities in the 2019 simultaneous elections include two things, namely, first, socializing to disability groups and collaborating with relevant agencies; The participation or use of the voting rights of persons with disabilities in Gunungkidul Regency is quite low, this cannot be separated from the fact that the majority are persons with disabilities in the physical category, the education level of the majority is Elementary School and the lack of family and community support, and; The obstacles faced in increasing the participation of persons with disabilities include three things, namely, first, the limited number of democracy volunteers from disabled groups, secondly the low budget for democracy volunteers, and; third, the lack of support from the community and families of people with disabilities related to the use of their right to vote.

### Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

### Kata kunci:

*Relawan Demokrasi, Partisipasi ,  
Penyandang Disabilitas. Pemilu 2019*

### Keywords:

*Democracy Volunteers, Participation,  
Persons with Disabilities. Election 2019*

## Pendahuluan

Demokrasi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang Bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Mahmuzar (2010, hal, 23), bahwa pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat. Manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas, sehingga agar kebebasan yang dimiliki manusia dapat dijalankan dengan baik, maka rakyat harus diperintah oleh rakyat. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan yang tanpa batas, namun kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab.

Sejalan dengan hal di atas, rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang menyebutkan dengan tegas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini tentu menegaskan kembali tentang pentingnya eksistensi warga masyarakat dalam suksesi pemerintahan yang berlangsung di Indonesia. Dengan demikian negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin, melindungi dan menegakkan hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.

Namun demikian, tidak semua manusia diciptakan secara sempurna, ada sebagian dari masyarakat yang harus hidup dengan berbagai kekurangan, salah satunya adalah penyandang disabilitas (*difabel/different ability*), yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas selayaknya. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak menyejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya (Daulay, 2013, hal, 1).

Selanjutnya pada dasarnya dalam berdemokrasi di Indonesia masih terdapat tiga masalah pokok dalam meninjau peran serta penyandang disabilitas pada pemilihan umum (pemilu) yaitu; a) Keterbatasan fasilitas dalam pemungutan suara bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf *Braille* bagi penyandang disabilitas netra; b) Mobilisasi dan manipulasi yang dialami penyandang disabilitas agar mencoblos partai tertentu. Hal ini berdasar anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak cukup punya kecerdasan dalam berpolitik dan mempunyai standar intelektual yang cukup rendah. Padahal selain penyandang disabilitas grahita, penyandang disabilitas tidaklah rusak sistem kerja otak melainkan hanya sensorik dan cacat anggota tubuh, dan; c) Tidak adanya garansi perubahan nasib penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal tersebut mendorong penyandang disabilitas untuk membuat kontrak politik terhadap beberapa caleg karena membutuhkan pengetahuan tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dan jaminan bahwa akan terperhatikannya hak-hak penyandang disabilitas (Dewi, 2014, hal, 15).

Pengabaian terhadap berbagai hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas salah satunya dalam hak memilih dalam pemilu tentu perlu menjadi perhatian yang serius bagi penyelenggara pemilu. Hak-hak tersebut penting untuk dilindungi sehingga penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak memilihnya bebas dari perlakuan diskriminatif. Dengan adanya partisipasi dari penyandang disabilitas tentu sangat berarti dalam melihat perkembangan demokratisasi di Indonesia.

Jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul merupakan jumlah DPT tertinggi di DIY pada Pemilu serentak tahun 2019. Jumlah di atas menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu untuk memberikan penguatan partisipasi bagi pemilih penyandang disabilitas.

Tabel 4. Persentase Partisipasi Politik dalam Pemilu Serentak di Provinsi DIY tahun 2019

No	Nama Kabupaten	Target tahun 2019	Partisipasi tahun 2019
----	----------------	-------------------	------------------------

1	Kota Yogyakarta	77,5%	84,9%
2	Kabupaten Sleman	82,5%	87,7%
3	Kabupaten Bantul	82%	88%
4	Kabupaten Kulon Progo	77%	86%
5	Kabupaten Gunungkidul	80%	82,26%

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan data tabel 4 di atas, maka dapat dikatakan kondisi pemilih penyandang disabilitas juga cukup mengkhawatirkan. Hal ini harus menjadi perhatian, mengingat sebagai contoh Kabupaten Bantul dengan DPT mencapai 692.839 jiwa “hanya” mampu menyumbangkan angka 48,02% peyandang disabilitas, padahal tingkat partisipasi masyarakatnya mencapai 88%. Maka Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah DPT mencapai 597.432 jiwa dan persentase pemilih sekitar 82,96% (persentase terendah di DIY) tentu sudah seharusnya mengupayakan penguatan partisipasi masyarakat khususnya pada penyandang disabilitas.

Selanjutnya salah satu cara untuk menguatkan partisipasi pemilih peyandang disabilitas inilah dibentuk sebuah kelompok relawan yaitu relawan demokrasi. Relawan demokrasi (Relasi) sangat dibutuhkan sebagai sebuah gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada proses pemilihan umum. Kehadiran relawan ini layaknya sebuah pendulum yang akan terus bergerak dari titik yang satu ke titik yang lain demi memberikan kontribusi nyata dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi sebagai “ruh” dalam berdemokrasi dapat diwujudkan dengan pelibatan kelompok masyarakat untuk menjadi pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya merupakan keharusan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitasnya (Muryanto, 2014, hal, 1).

Pada kelompok pertama dan kedua dapat dikatakan memiliki agenda politik, namun sayangnya keduanya tidak memiliki massa yang jelas. Hal ini berbeda dengan kelompok ketiga yang tidak memiliki agenda politik namun memiliki banyak jaringan massa dari semua lapisan masyarakat. Hal itu didasarkan bekal popularitas yang dimiliki oleh pegiat seni dan kreatif dapat menarik lebih banyak pendukung dan pengikut (Arianto, 2014, hal, 132). Dengan demikian kiranya dapat dikatakan bahwa peyandang disabilitas—dalam Relawan Demokrasi khususnya—merupakan bagian dari entitas kreatifitas yang muncul bukan karena reaktif terhadap persoalan, namun karena sejak awal memiliki sikap pro aktif dan mempunyai kerelaan “menyumbangkan” dirinya untuk bekerja dengan segenap tenaga dan pikirannya tanpa mengharapkan imbalan materi.

Melihat pemaparan data di atas mengenai partisipasi pemilih peyandang disabilitas tentu menarik untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam. Hal ini mengingat beberapa persoalan yang disampaikan di atas, khususnya mengenai upaya yang dilakukan oleh relawan demokrasi sebagai wadah yang bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu mendeskripsikan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas oleh relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu 2019. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Maret hingga Mei 2021 di KPU Kabupaten Gunungkidul.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive*. Berdasarkan teknik tersebut, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU Gunungkidul, Koordinator Relawan Demokrasi basis disabilitas dan perwakilan PPD Gunungkidul. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara dan dokumentasi.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2019 oleh relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan teknik *crosscheck*. Data yang telah ada terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif induktif, yakni permasalahan-permasalahan khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Upaya Relawan Demokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Beberapa upaya yang dilakukan oleh relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2019 yakni.

#### 1. Melakukan Sosialisasi Kepada Kelompok Disabilitas

Partisipasi politik sebagaimana disampaikan oleh Budiarto (2008, hal, 367) merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Artinya partisipasi menyangkut keaktifan warga negara untuk ikut dalam menyampaikan hak-hak suaranya.

Terkait dengan pendapat di atas pemberian suara dalam pemilihan umum menjadi salah satu bentuk partisipasi politik warga negara. Penggunaan hak pilih warga negara dalam berbagai kasus jelas mengalami pasang surut yang dikarenakan oleh beberapa hal, misalnya pendidikan, lingkungan, ideologi dan lain sebagainya. Hal tersebut juga berlaku pada partisipasi penyandang disabilitas, terutama di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki jumlah DPT penyandang disabilitas tertinggi di DIY pada pemilu serentak 2019 (Pemilu Dalam Angka 2019, hal, 7).

Sosialisasi secara massif merupakan salah satu strategi komunikasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi sebagai bagian penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Gunungkidul khususnya pada basis pemilih penyandang disabilitas. setidaknya tiga hal penting yang dapat menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan selama proses sosialisasi oleh relawan demokrasi. Adapun ketiga hal tersebut yaitu terkait jumlah kegiatan yang cukup massif, materi yang kompleks dan juga respon positif masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut;

#### a. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemilih Penyandang Disabilitas Cukup Massif

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas terlihat bahwa Relawan Demokrasi mengagendakan lebih dari sepuluh lokasi untuk melakukan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019. Pengagendaan lebih dari sepuluh lokasi kegiatan ini jelas mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi pada pemilih disabilitas menjadi sebuah prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan kegiatan sosialisasi pada kelompok lain yang bahkan tidak lebih dari lima lokasi kegiatan, seperti kelompok arisan yang hanya sekitar 3-4 lokasi, TNI yang hanya satu kali, komunitas paralyang, motor klasik yang masing-masing hanya sekitar 2 kali kegiatan.

Selanjutnya, terlepas dari kegiatan yang memang masuk dalam agenda Relawan Demokrasi Kabupaten Gunungkidul pada bidang atau segmen disabilitas di atas, terdapat kegiatan yang sifatnya insidental atau sesuai kondisi. Artinya kegiatan sosialisasi yang dilakukan di luar jadwal dimana

kegiatan tersebut menyangkut baik relawan dari kelompok disabilitas ataupun peserta sosialisasi yang di dalamnya terdapat penyandang disabilitas.

Selanjutnya selain sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Kabupaten Gunungkidul terhitung cukup massif. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen yang disusun oleh KPU Kabupaten Gunungkidul disebutkan bahwa dalam rentang tanggal 1 Februari hingga tanggal 16 April 2019 telah dilakukan seratus tiga puluh delapan (138) kegiatan oleh Relawan Demokrasi Kabupaten Gunungkidul di berbagai titik yang berbeda.

#### **b. Materi Sosialisasi yang Kompleks**

Sementara itu, selain agenda sosialisasi yang cukup banyak dilakukan oleh relasi basis disabilitas, secara materi yang disampaikan juga cukup kompleks. Materi secara umum yang disampaikan terkait dengan pentingnya ikut partisipasi dalam pemilu, pengenalan surat suara, pengenalan partai politik, cara cek DPT. Hal ini jelas penting untuk dilakukan mengingat pada pemilu serentak terdapat pemilihan legislatif dan eksekutif dalam waktu yang bersamaan.

Hal ini jelas bukan merupakan pekerjaan mudah, mengingat secara teknis dalam pemilihan umum para pemilih akan dihadapkan dengan lima surat suara dan lima kotak suara dimana setiap masing-masing surat suara memiliki warna yang menunjukkan fungsi yang berbeda-beda. Materi ini menjadi salah satu hal pokok terkait teknis yang disampaikan oleh relawan demokrasi kepada pemilih penyandang disabilitas. Selain itu dalam pelaksanaan di lapangan kemungkinan terjadi “salah kotak” akan terbuka lebar. Apabila kesalahan dalam memasukkan kotak suara terjadi maka sudah tentu dianggap suara tidak sah. Hal ini tentu akan merugikan pengguna hak pilih karena suaranya tidak diakui.

#### **c. Respon Positif Masyarakat Terkait Sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi pada kelompok difabel memang lebih berorientasi pada kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan disabilitas. Hal ini tentu didasarkan selain karena terbatasnya relawan demokrasi pada segmen disabilitas juga mengingat jumlah penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga apabila dilakukan secara orang perorangan maka dirasa waktu yang tersedia tidak akan cukup.

Selanjutnya, selain jumlah kegiatan yang cukup padat dan materi yang cukup kompleks, kegiatan tersebut juga diikuti oleh banyak penyandang disabilitas. Misalnya saja kegiatan yang dilakukan di rumah anggota Pertuni yang mencapai 50 orang, kemudian di Wonosari bahkan mencapai 80an orang. Hal ini tentu cukup positif, mengingat bahwa di kegiatan lain yang melibatkan perwakilan-perwakilan kelompok disabilitas juga cukup banyak dilakukan.

Dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih disabilitas, biasanya tidak diikuti oleh seluruh segmen disabilitas pada Relawan Demokrasi, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saja dari lima orang anggota disabilitas pada Relawan Demokrasi akan dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 2-3 orang setiap kelompok kecil untuk melakukan sosialisasi di tempat yang berbeda.

### **2. Melakukan Kerjasama Dengan Instansi Terkait**

Relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Adanya dukungan tersebut jelas dapat membantu kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga hasil yang diperoleh juga diharapkan lebih optimal. Hal ini mengingat “biasanya” instansi seperti Pemerintah Desa atau kelompok masyarakat memiliki kedekatan dengan masyarakat. Apabila kegiatan sosialisasi dilakukan di wilayah yang tidak begitu dikenali oleh relawan demokrasi tentu membutuhkan kerjasama dengan instansi setempat.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Tohopi, dkk (2019, hal, 74) terkait relawan demokrasi dan partisipasi perempuan dan pemilih pemula. Menurut Tohopi Pendekatan persuasif sangat diperlukan dalam hal ini dilakukan setelah mengidentifikasi sasaran. Pendekatan dilakukan baik pada individu

yang dianggap penting untuk dipengaruhi serta kepada kelompok perempuan dan kelompok pemuda (Kelompok wanita tani, kelompok tadarus, kelompok kerajinan, kelompok usaha wanita, kelompok pemuda desa, karang taruna).

Adapun instansi/lembaga atau kelompok terkait yang terlibat dalam kerjasama dengan relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

#### **a. Kerjasama dengan organisasi disabilitas**

Kerjasama dengan kelompok atau organisasi penyandang disabilitas jelas merupakan suatu keharusan bagi relawan demokrasi khususnya segmen disabilitas. Hal setidaknya dikarenakan dua hal yaitu *pertama*, sasaran dari sosialisasi adalah para penyandang disabilitas sehingga apabila menysasar kepada kelompok maka proses pengorganisasian untuk mengikuti kegiatan akan lebih mudah sehingga dari sisi waktu dan proses akan lebih efisien. *Kedua*, dari sisi relawan demokrasi sendiri dengan terbatasnya jumlah personil menjadi persoalan apabila harus sosialisasi dari rumah ke rumah penyandang disabilitas.

Berdasarkan dokumentasi yang disajikan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul terlihat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh relawan demokrasi bersama dengan ormas atau LSM. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang juga melibatkan KPU, Kesbangpol, dan instansi terkait lainnya sehingga pendokumentasiannya menjadi terbatas. Semenara itu dalam beberapa kesempatan relawan demokrasi telah melakukan kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas seperti Pertuni, PPDI, FKGI dan lain-lain. Adapun kegiatan yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas tersebut biasanya dilakukan di rumah anggota atau sekretariat organisasi tersebut.

#### **b. Kerjasama dengan Pemerintah Desa di Lokasi Kegiatan**

Selanjutnya kerjasama yang dilakukan oleh relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul khususnya pada segmen disabilitas yaitu melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa dimana kegiatan tersebut dilakukan. Walaupun tidak ada keharusan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, namun relawan demokrasi dalam melakukan kegiatan tentu membutuhkan dukungan dari segenap komponen salah satunya pemerintah desa.

Adanya kerjasama dengan pemerintah desa akan menjadikan kegiatan sosialisasi berjalan lebih efektif. Hal ini dikarenakan salah satunya pemerintah desa biasanya akan memfasilitasi tempat kegiatan. Selain itu data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah desa khususnya terkait dengan pemilih disabilitas di wilayah tersebut akan menjadikan kegiatan tepat sasaran. Artinya penyampaian informasi terkait kegiatan sosialisasi yang melibatkan penyandang disabilitas akan lebih mudah tersampaikan sehingga harapannya peserta yang mengikuti kegiatan dapat berjumlah maksimal.

### **Partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu serentak tahun 2019**

Partisipasi dalam pemilihan umum baik di tingkat daerah ataupun secara nasional merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal tersebut menandakan bahwa warga negara dengan disabilitas sudah seharusnya memiliki hak menggunakan suaranya dalam pemilihan umum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Daulay (2013, hal, 1) telah dengan tegas menyatakan bahwa kondisi yang menyebabkan orang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas selayaknya tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak menyejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Terkait dengan angka partisipasi yang cukup rendah bagi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai hal yang dapat menjadi gambaran mengenai kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan hak politik, diantaranya yaitu.

#### **1. Mayoritas Merupakan Penyandang Difabel Kategori Fisik**

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul kategori fisik mencapai 1.496 jiwa yang terdiri dari difabel netra, daksa dan rungu. Sedangkan untuk penyandang disabilitas kategori mental mencapai 524 jiwa yang terdiri dari tuna grahita. Adapun penyandang disabilitas lainnya di Kabupaten Gunungkidul mencapai 475 jiwa.

Berdasarkan data di atas, jelas terlihat bahwasanya keterbatasan secara fisik yang dialami oleh para difabel di Kabupaten Gunungkidul akan berpengaruh terhadap akses dalam melakukan pemenuhan hak politik sebagai warga negara. Hal tersebut juga dipertegas dengan pandangan yang disampaikan oleh Budiardjo (2008, hal, 378-379) bahwa terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik seorang warga negara yaitu, 1) faktor sosial ekonomi; 2) faktor politik; 3) faktor fisik individu dan lingkungan. Dalam hal faktor fisik, Budiardjo menegaskan bahwa faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Sehingga wajar apabila kemudian keterbatasan fisik sedikit atau banyak akan memberikan pengaruh pada partisipasi politik seorang warga negara.

Selanjutnya berdasarkan pandangan di atas, dapat dijelaskan bahwa kondisi partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh keterbatasan mayoritas difabel yang masuk dalam kategori fisik. Walaupun demikian, tak dapat dipungkiri pengaruh tersebut juga pasti dirasakan oleh penyandang difabel pada ketegori yang lain.

## **2. Tingkat Pendidikan Mayoritas Penyandang Disabilitas Sekolah Dasar**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang memberikan pengaruh terhadap partisipasi seorang warga negara. Selaras dengan pandangan tersebut Surbakti (2006, hal, 126) menyebutkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi perilaku politik dan bentuk partisipasi politik seseorang, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lipset di Amerika Serikat menemukan bahwa individu yang pendidikannya lebih tinggi lebih banyak berpartisipasi daripada individu yang pendidikannya lebih rendah.

Selanjutnya dalam kenyataan di lapangan, pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/ sederajat) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/ sederajat). Walaupun demikian tentu terdapat pula sebagian kecil penyandang difabel yang memiliki tingkat pendidikan sampai ke level Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) hingga pada perguruan tinggi.

## **3. Dukungan Lingkungan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Rendah**

Dalam hal partisipasi politik warga negara, Surbakti (2006, hal, 127) menjelaskan bahwa faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga perantaranya. Faktor lingkungan dalam lingkungan dapat mencakup keluarga dan teman bergaul. Sejalan dengan pendapat di atas, Budiardjo (2008, hal, 379) secara singkat menjelaskan bahwa memang lingkungan akan memberikan pengaruh pada partisipasi politik warga negara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks lingkungan masyarakat sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antaran berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

Selanjutnya dalam konteks pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul pada beberapa kasus memang merasakan minimnya dukungan dari masyarakat khususnya untuk melaksanakan haknya sebagai seorang warga negara dalam hal ini kegiatan pemilu serentak tahun 2019. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak M sebagai koordinator Relawan Demokrasi bidang disabilitas bahwa memang peran lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada pemberian suara oleh kelompok pemilih penyandang disabilitas. Apabila lingkungan keluarga sudah tak acuh, tentu keinginan untuk memenuhi hak suaranya tidak dapat tersalurkan.

**Hambatan Relawan Demokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**

Secara garis besar terdapat tiga hal yang menjadi hambatan dalam peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas oleh relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul pada pemilu 2019. Adapun hambatan tersebut yaitu sebagai berikut.

### **1. Keterbatasan Jumlah Relawan Demokrasi Dari Kelompok Difabel**

Relawan demokrasi di Kabupaten Gunungkidul pada pemilihan umum serentak tahun 2019 berjumlah 55 orang yang terdiri dari 10 basis pemilih. Adapun untuk basis pemilih disabilitas di Kabupaten Gunungkidul “hanya” berjumlah 5 orang. Padahal jika melihat data tentang daftar pemilih tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul mencapai 2.493 jiwa. Jumlah ini jelas dirasa kurang maksimal khususnya bagi pemilik hak pilih penyandang disabilitas. Selain karena faktor jumlah, “keterbatasan” yang dimiliki oleh para relawan dari basis disabilitas tentu menjadikan para relawan tidak seeluasanya relawan pada basis pemilih yang lain seperti pemuda, pemilih pemula, warga internet dan lain sebagainya.

Padahal sebagaimana dijelaskan oleh Budiardjo (2008, hal, 379) bahwa fisik individu akan memberikan pengaruh pada partisipasi seseorang baik itu terkait dengan pelayanan dan aksesibilitas lainnya. Melihat apa yang disampaikan oleh Budiardjo di atas maka sangat masuk akal jika relawan demokrasi merasa kesulitan dalam menjangkau 18 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

### **2. Rendahnya Anggaran Dana Bagi Relawan Demokrasi**

Relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul memiliki masa kerja sekitar 3-4 bulan, dimana masa efektif pelaksanaan program kerja selama kurang lebih 2 bulan. Menurut penuturan Bapak Mujiyana hal ini terkait dengan masa persiapan, perencanaan program selanjutnya diakhir terdapat evaluasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi.

Selanjutnya terkait dengan anggaran yang menjadi hambatan bagi relawan demokrasi tentu tidak dapat dilepaskan dari aksesibilitas relawan demokrasi basis disabilitas dalam melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai daerah di Kabupaten Gunungkidul yang sangat luas. Selain pada akses dalam melaksanakan kegiatan, kurangnya anggaran juga dirasakan oleh relawan demokrasi dalam pembuatan alat peraga huruf braile bagi penyandang disabilitas tuna netra. Ketidacukupan anggaran ini tentu memberikan hambatan bagi relawan demokrasi dalam menyosialisasikan terkait pemilihan umum kepada penyandang disabilitas.

### **3. Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Keluarga Pada Penyandang Disabilitas**

Lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan hal penting dalam menentukan partisipasi pemilih dalam sebuah proses pemilihan umum termasuk juga bagi pemilih penyandang disabilitas. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Surbakti (2006, hal, 379) yang menyatakan bahwa lingkungan dapat memberikan pengaruh pada partisipasi politik seseorang. Bahkan beliau menegaskan terutama pada lingkungan keluarga dimana watak pertama seorang individu dibentuk adalah keluarga. Maka dalam konteks partisipasi pemilih penyandang disabilitas apabila dukungan dari masyarakat kurang optimal dan dukungan dari keluarga juga minim tentu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul menjadi tidak optimal.

Sementara itu selain lingkungan masyarakat persoalan dukungan dan kesadaran politik yang rendah juga terjadi pada lingkungan keluarga. Persoalan ini sangat pelik, mengingat keluarga merupakan orang-orang yang terus kebersamai para penyandang disabilitas dalam melakukan segala aktivitasnya. Dalam konteks penggunaan hak pilih pada pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul dukungan keluarga dianggap masih minim. Dalam penuturan Bapak Mujiyana disebutkan bahwa beberapa keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel memiliki kecenderungan menutup-nutupi sehingga tidak terdata sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Akibatnya baik ketika kegiatan sosialisasi maupun pelaksanaan pemilihan umum para penyandang disabilitas yang tidak memiliki informasi memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

## **Simpulan dan Saran**



Upaya relawan demokrasi Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum serentak tahun 2019 meliputi dua hal yaitu, *pertama*, melakukan sosialisasi kepada kelompok disabilitas baik yang telah terjadwal maupun yang insidental. *Kedua*, melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Selanjutnya, partisipasi atau penggunaan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan cukup rendah. Hal ini dikarenakan pengguna hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul hanya sebanyak 551 jiwa atau sekitar 21,88%. Selanjutnya hal kondisi partisipasi pemilih penyandang disabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal yakni, mayoritas merupakan penyandang disabilitas pada kategori fisik; tingkat pendidikan penyandang disabilitas mayoritas rendah (Sekolah Dasar), dan; dukungan lingkungan masyarakat kepada penyandang disabilitas yang rendah. Sementara itu, hambatan yang dihadapi oleh relawan demokrasi dalam mengupayakan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas meliputi tiga hal yaitu, keterbatasan jumlah relawan demokrasi dari kelompok difabel, rendahnya anggaran dana bagi relawan demokrasi, dan; kurangnya dukungan masyarakat dan keluarga para penyandang disabilitas terkait dengan penggunaan hak pilihnya. Adapun saran yang dapat diberikan yakni perlu melakukan sosialisasi dan kerjasama sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas perlu ditingkatkan dari aspek inovasinya. Selanjutnya, perlunya gebrakan dari pemerintah daerah dan instansi terkait khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul, diantaranya hak pendidikan. Selain itu, penempatan satu relawan pada setiap kecamatan sehingga lebih efektif. Kemudian terkait anggaran pelaksanaan kegiatan seharusnya dapat lebih ditingkatkan atau setidaknya dana operasional dapat diberikan tepat waktu sehingga relawan tidak menggunakan uang pribadi pada saat kegiatan.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Suharno, M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan jurnal ini. Selain itu penulisan juga menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Relawan Demokrasi Kabupaten Gunungkidul dan Pengurus PPDl Kabupaten Gunungkidul yang telah bersedia memberikan informasi guna penulisan jurnal hasil penelitian ini.

### Referensi

- Arianto, B. (2014). Fenomena relawan politik dalam kontestasi presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 18 (2), 130-146.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daulay, Z. (2013). *Makna konvensi hak penyandang disabilitas (crpd) dan implementasinya dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif serta urgensi perda perlindungan disabilitas*. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat.
- Dewi, U. (2014). *Pelayanan publik bagi difabel di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- KPU Kabupaten Gunungkidul. (2014). *Pemilu Dalam Angka tahun 2014 Kabupaten Gunungkidul*
- KPU Kabupaten Gunungkidul. (2020). *Pemilu Dalam Angka tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul*
- Mahmuzar. (2010). *Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*. Bandung: Nusa Media

Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Surbakti,R, dkk. (2013). *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

Tohopi, dkk. (2019). *Modul relawan demokrasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019*. Gorontalo: KPU Gorontalo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Penguatan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Kabupaten Gunungkidul oleh Relawan Demokrasi pada Pemilu 2019

Nama : Bayu Setya Anggara

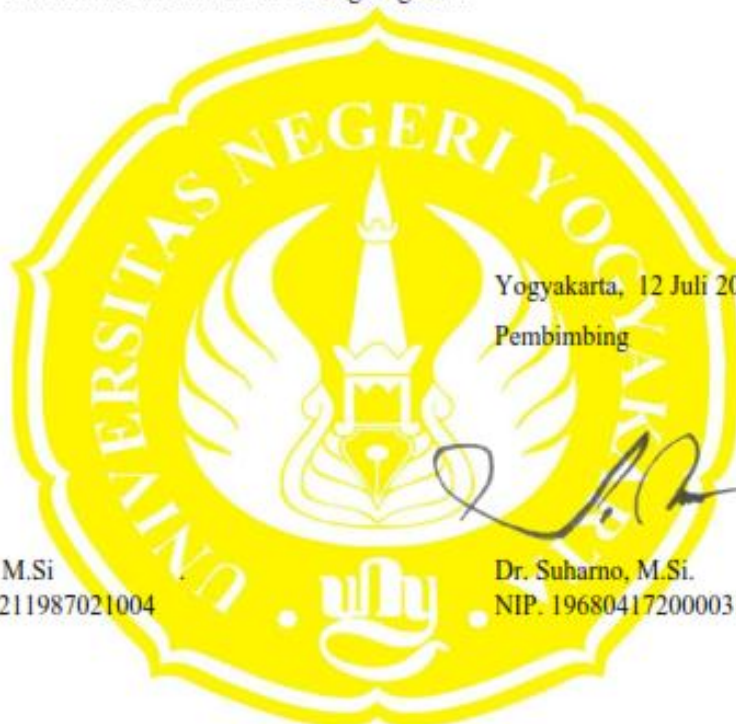
NIM : 15401241033

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Reviewer



Dr. Sunarso, M.Si  
NIP. 196005211987021004



Yogyakarta, 12 Juli 2021

Pembimbing



Dr. Suharno, M.Si  
NIP. 196804172000031001

Rekomendasi pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. ~~Dikirim ke Journal Civic~~
3. ~~Dikirim ke Journal lain~~